



KEPALA DESA HADIPOLO  
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA HADIPOLO  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA HADIPOLO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);



14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);

27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 900/302/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2023;
31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 900/303/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2023;
32. Peraturan Desa Hadipolo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Hadipolo Tahun 2018 Nomor 4);
33. Peraturan Desa Hadipolo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Hadipolo Tahun 2019 Nomor 5);
34. Peraturan Desa Hadipolo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Hadipolo Tahun 2019 Nomor 6);
35. Peraturan Desa Hadipolo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Hadipolo Tahun 2019 Nomor 7);



36. Peraturan Desa Hadipolo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hadipolo Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Hadipolo Tahun 2020 Nomor 2);
37. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hadipolo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Hadipolo Tahun 2022 Nomor 5).

- Memperhatikan : 1. Surat Camat Jekulo tanggal 6 Februari 2023 Nomor 142/097/33.02/2023 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Hadipolo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Hadipolo tanggal 4 Februari 2023 Nomor 142/01/33.07.10/2023 tentang Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Hadipolo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Hadipolo tanggal 7 Februari 2023 Nomor 142/02/33.07.10/2022 tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Hadipolo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HADIPOLO  
dan  
KEPALA DESA HADIPOLO

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA HADIPOLO TAHUN ANGGARAN 2023

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.992.555.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	4.757.824.569,00
(Defisit )	Rp.	(765.269.569,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	785.269.569,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	765.269.569,00
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)	Rp.	0,-
Tahun Berjalan		
(Surplus/(Defisit) + Selisih		
Pembiayaan)		

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.



- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Hadipolo.

Ditetapkan di Desa Hadipolo

Pada tanggal 8 Februari 2023

KEPALA DESA HADIPOLO



SULEMAN SLAMET

Diundangkan di Desa Hadipolo

Pada tanggal 8 Februari 2023

SEKRETARIS DESA HADIPOLO



ZIKO ARYANA

LEMBARAN DESA HADIPOLO TAHUN 2023 NOMOR 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA HADIPOLO  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	770.950.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.221.605.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.992.555.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.142.233.056,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.289.474.600,00	
5.3.	Belanja Modal	2.146.297.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	179.819.913,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.757.824.569,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(765.269.569,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	785.269.569,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	785.269.569,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>765.269.569,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KUDUS, 09 February 2023  
KEPALA DESA  
KEPALA DESA  
HADIPOLO  
SULEMAN SLAMET



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA HADIPOLLO  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	770.950.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.221.605.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.992.555.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.735.444.656,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)</b>	<b>1.565.179.156,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.700.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	56.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	472.002.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	472.002.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	62.831.856,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	62.831.856,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	230.255.000,00	ADD, FSH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	230.255.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	129.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	129.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perijinan)	15.000.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.814.400,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.185.600,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	190.190.300,00	PAD
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	8.668.800,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.521.500,00	
1.1.90		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Berhak	409.200.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	409.200.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>16.220.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.2.90		Pemeliharaan sarana perkantoran/Pemerintahan	13.220.000,00	FSH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.220.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	84.045.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.500.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8.485.500,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.485.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	65.000.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transfer, biaya kliring dll)	6.060.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.060.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	70.000.000,00	
1.5.04		Mediasi Konflik Pertanahan	15.000.000,00	PAD
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	55.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>2.296.516.000,00</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	21.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	211.619.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	1.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	210.419.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.419.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.713.297.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	1.265.297.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.265.297.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	108.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	108.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	100.000.000,00	PBP
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	240.000.000,00	PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	240.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	350.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	200.000.000,00	PBP
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Di pilih)	150.000.000,00	PBK
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>382.204.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>70.384.500,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	21.564.000,00	PAD, PBH
3.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	2.016.000,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.548.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	13.440.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.440.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	35.380.500,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.380.500,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>177.493.500,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	8.600.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	168.893.500,00	DDS, PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.893.500,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>134.326.000,00</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	14.000.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.030.000,00	ADD, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.030.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	93.861.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.861.000,00	
3.4.91		Pembinaan karang Taruna	18.435.000,00	PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.435.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>163.840.000,00</u></b>	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>133.840.000,00</b>	
4.4.90		Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak yatim dll)	133.840.000,00	PAD, PBH
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.840.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>30.000.000,00</b>	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	30.000.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.6.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u></b>	<b><u>179.819.913,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>43.019.913,00</b>	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	43.019.913,00	ADD, DDS, PAD,



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA**  
**PEMERINTAH DESA HADIPOLO KECAMATAN JEKULO**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			<b>3.992.555.000,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			<b>770.950.000,00</b>
<b>4.1.2.</b>	<b>Hasil Aset Desa</b>			<b>770.950.000,00</b>
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			769.200.000,00
	01. Lelang Bondo Desa PAD	1 th	360.000.000,00	360.000.000,00
	02. Bengkok Kepala Desa PAD	1 th	66.000.000,00	66.000.000,00
	03. Bengkok Sekretaris Desa PAD	1 th	60.000.000,00	60.000.000,00
	04. Bengkok Perangkat Desa PAD	1 th	283.200.000,00	283.200.000,00
4.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Desa			1.750.000,00
	01. Hasil Sewa Lumbung Desa PAD	1 th	1.750.000,00	1.750.000,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>3.221.605.000,00</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Dana Desa</b>			<b>1.315.960.000,00</b>
4.2.1.01.	Dana Desa			1.315.960.000,00
	01. Dana Desa DDS	1 th	1.315.960.000,00	1.315.960.000,00
<b>4.2.2.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<b>205.956.600,00</b>
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			205.956.600,00
	01. Bagi Hasil Pajak PBH	1 th	178.303.100,00	178.303.100,00
	02. Restribusi Daerah PBH	1 th	27.653.500,00	27.653.500,00
<b>4.2.3.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>929.688.400,00</b>
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			929.688.400,00
	01. Alokasi Dana Desa ADD	1 th	929.688.400,00	929.688.400,00
<b>4.2.4.</b>	<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>			<b>645.000.000,00</b>
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			645.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan APBD Provinsi Sarpras PBP	1 th	640.000.000,00	640.000.000,00
	02. Bantuan Keuangan APBD Provinsi KPMD PBP	1 th	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>4.2.5.</b>	<b>Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</b>			<b>125.000.000,00</b>
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			125.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten PBK	1 th	125.000.000,00	125.000.000,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<b>0,00</b>
<b>4.3.6.</b>	<b>Bunga Bank</b>			<b>0,00</b>
4.3.6.01.	Bunga Bank			0,00
	01. Bunga Bank DLL	1 th	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>3.992.555.000,00</b>



KUDUS, 08 February 2023  
 SEKRETARIS DESA

*[Signature]*  
 ZIKO ARYANA

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.019.913,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	136.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	136.800.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	136.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.757.824.569,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(765.269.569,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	785.269.569,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	765.269.569,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

